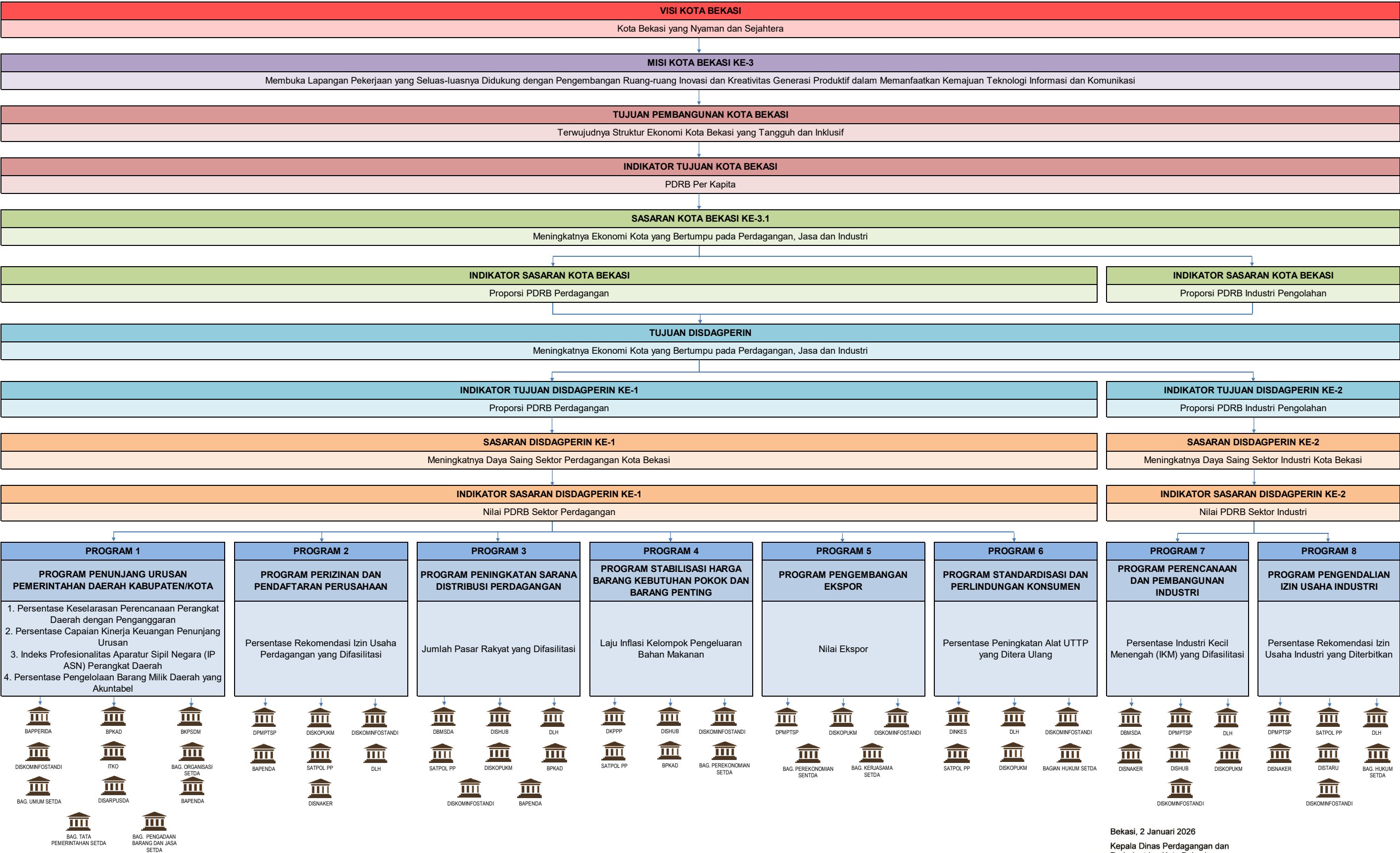


CROSS CUTTING DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI
TAHUN 2026



Bekasi, 2 Januari 2026

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Bekasi,


Dra. Ika Indah Yarti, M.Si.
Pemimpin Utama Muda
NIP 196701141986102001

Berikut Perangkat Daerah yang menjadi *cross cutting* (lintas urusan) pada Program-Program milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
--> Cross cutting pada aspek perencanaan dan pengendalian
 - Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan PD.
 - Fasilitasi penyusunan Renja, Renstra, dan evaluasi kinerja.
 - Integrasi indikator kinerja PD.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
--> Program penunjang sangat bergantung pada fungsi BPKAD
 - Pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan PD.
 - Penyaluran SP2D, pengelolaan aset, dan laporan keuangan.
 - Pembinaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
--> Cross cutting pada aspek SDM aparatur
 - Manajemen ASN (kepegawaian, kinerja, disiplin)
 - Pengembangan kompetensi dan diklat pegawai
 - Penilaian kinerja ASN (e-Kinerja)
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi)
--> Penunjang digitalisasi dan SPBE
 - Dukungan sistem informasi pemerintahan
 - Infrastruktur TIK dan aplikasi PD
 - Keamanan informasi dan persandian
5. Inspektorat Kota Bekasi
--> Cross cutting pada aspek akuntabilitas dan pengendalian intern
 - Pengawasan internal atas pelaksanaan program dan kegiatan
 - Reviu perencanaan dan pelaporan kinerja
 - Pembinaan tata kelola dan manajemen risiko
6. Bagian Organisasi Setda
--> Beririsan dengan penataan organisasi dan kinerja
 - Evaluasi kelembagaan dan tata laksana PD
 - Penyusunan Anjab dan ABK
 - Pembinaan reformasi birokrasi
7. Bagian Umum Setda
--> Mendukung operasional perangkat daerah
 - Fasilitasi sarana dan prasarana perkantoran
 - Pengelolaan rumah tangga dan layanan umum
8. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
--> Cross cutting pada aspek kearsipan
 - Pembinaan pengelolaan arsip PD
 - Sistem kearsipan dinamis dan statis
 - Pendampingan tata kelola arsip
9. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
--> Pendukung keberlanjutan pembiayaan daerah
 - Integrasi data belanja dan operasional PD dengan kebijakan pendapatan daerah
 - Dukungan kebijakan fiskal daerah
10. Bagian Tata Pemerintahan Setda
 - Fasilitator laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
11. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - Fasilitator dan pembina proses pengadaan barang/jasa
 - Pendampingan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan

2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) :
--> Cross cutting karena program perizinan substantif dilaksanakan bersama DPMPTSP
 - Pelayanan dan penerbitan perizinan berusaha.

- Pengelolaan sistem OSS (*Online Single Submission*).
- Koordinasi teknis perizinan lintas PD.
- 2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - > Beririsan langsung pada pendaftaran dan legalitas pelaku usaha
 - Pendataan dan Pembinaan UMKM
 - Sinkronisasi data pelaku usaha mikro dan kecil
 - Fasilitasi legalitas usaha (NIB, izin usaha UKM)
- 3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi)
 - > Mendukung aspek digitalisasi dan keterbukaan informasi
 - Dukungan sistem informasi perizinan.
 - Integrasi data perizinan dan pendaftaran perusahaan.
 - Diseminasi informasi kebijakan perizinan.
- 4. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
 - > Perizinan dan pendaftaran berdampak langsung pada PAD
 - Keterkaitan perizinan usaha dengan objek pajak daerah.
 - Validasi data wajib pajak usaha.
 - Optimalisasi pendapatan daerah dari sektor usaha.
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja
 - > Cross cutting pada aspek pengawasan dan penegakan hukum
 - Penegakan Perda dan Perkada terkait perizinan usaha.
 - Pengawasan kepatuhan pelaku usaha.
 - Penerbitan usaha tidak berizin.
- 6. Dinas Lingkungan Hidup
 - > Perizinan usaha wajib memperhatikan aspek lingkungan
 - Rekomendasi dan persetujuan lingkungan (UKL-UPL/SPPL).
 - Pengawasan dampak lingkungan usaha.
- 7. Dinas Ketenagakerjaan
 - > Perusahaan terdaftar → objek pengawasan ketenagakerjaan
 - Keterkaitan pendaftaran perusahaan dengan data ketenagakerjaan.
 - Pembinaan perusahaan terkait norma ketenagakerjaan.

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

1. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)
 - > Sarana distribusi sangat bergantung pada infrastruktur fisik
 - Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pendukung distribusi (jalan lingkungan pasar, drainase, bangunan pendukung)
2. Dinas Perhubungan
 - > Distribusi barang tidak terlepas dari sistem transportasi
 - Pengaturan akses transportasi dan lalu lintas di kawasan pasar
 - Penataan parkir dan akses bongkar muat barang
 - Dukungan kelancaran distribusi logistik
3. Dinas Lingkungan Hidup
 - > Sarana distribusi harus memenuhi standar lingkungan
 - Pengelolaan kebersihan dan persampahan kawasan pasar
 - Rekomendasi dan pengawasan lingkungan
 - Dukungan pengelolaan limbah sarana perdagangan
4. Satuan Polisi Pamong Praja
 - > Menjamin ketertiban operasional sarana distribusi
 - Penegakan Perda di kawasan pasar
 - Penertiban pedagang dan aktivitas distribusi
 - Dukungan ketertiban umum dan keamanan sarana perdagangan
5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - > Sarana distribusi digunakan langsung oleh UMKM
 - Pembinaan pedagang/UMKM pengguna sarana distribusi
 - Sinkronisasi data pelaku usaha
 - Pemberdayaan ekonomi lokal berbasis pasar

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
 - > Sarana distribusi merupakan aset daerah
 - Dukungan penganggaran dan penatausahaan aset sarana distribusi
 - Pengelolaan aset daerah hasil pembangunan/pengadaan
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi)
 - > Pendukung digitalisasi dan keterbukaan informasi
 - Dukungan sistem informasi pasar/sarana perdagangan
 - Publikasi dan diseminasi informasi sarana distribusi
8. Badan Pendapatan Daerah
 - Pendukung optimalisasi penerimaan daerah
 - Koordinasi penetapan dan penyesuaian tarif pajak/retribusi

4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
 - > Sangat beririsan pada aspek pasokan dan keterjangkauan harga
 - Pemantauan ketersediaan dan cadangan pangan
 - Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)
 - Pengendalian kerawanan pangan dan pasokan
2. Dinas Perhubungan
 - > Distribusi memengaruhi stabilitas harga
 - Kelancaran distribusi dan logistik barang kebutuhan pokok
 - Pengaturan lalu lintas distribusi, terutama saat HBKN
 - Dukungan pengendalian biaya distribusi
3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi)
 - > Mendukung transparansi dan keterbukaan informasi harga
 - Publikasi informasi harga harian dan kebijakan stabilisasi
 - Dukungan sistem informasi pemantauan harga
 - Diseminasi informasi kepada masyarakat
4. Satuan Polisi Pamong Praja
 - > Menjaga ketertiban dan kepatuhan pelaku usaha
 - Pengawasan dan penegakan Perda terkait perdagangan
 - Penertiban praktik penimbunan dan pelanggaran distribusi
 - Dukungan pengendalian harga di lapangan
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
 - > Menjamin kelancaran pendanaan program
 - Dukungan penganggaran program stabilisasi harga
 - Penatausahaan belanja kegiatan stabilisasi
6. Bagian Perekonomian Setda
 - Koordinator kebijakan ekonomi daerah
 - Fasilitator koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
 - Pemantau dan evaluator pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga

5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Dinas Kesehatan
 - > Sangat beririsan pada aspek keamanan produk
 - Pengawasan keamanan pangan olahan dan produk kesehatan
 - Rekomendasi kelayakan produk yang dikonsumsi masyarakat
 - Perlindungan konsumen dari risiko kesehatan
2. Dinas Lingkungan Hidup
 - > Perlindungan konsumen mencakup aspek lingkungan
 - Pengawasan produk yang berdampak lingkungan
 - Dukungan pengelolaan limbah dan bahan berbahaya
 - Perlindungan konsumen dari risiko lingkungan
3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi)
 - > Mendukung transparansi dan literasi konsumen
 - Diseminasi informasi hak dan kewajiban konsumen
 - Publikasi hasil pengawasan dan edukasi konsumen
 - Dukungan sistem informasi pengaduan konsumen

4. Satuan Polisi Pamong Praja
 - > Menjamin kepatuhan pelaku usaha
 - Penegakan Perda terkait perlindungan konsumen
 - Penertiban pelanggaran perdagangan dan standar produk
 - Dukungan pengawasan di lapangan
5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - > Standardisasi pelaku usaha kecil
 - Pembinaan UMKM agar memenuhi standar mutu dan kemasan
 - Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk UMKM
 - Perlindungan konsumen melalui peningkatan kualitas produk lokal
6. Bagian Hukum Setda
 - > Aspek regulasi dan kepastian hukum
 - Fasilitasi penyusunan regulasi daerah terkait perlindungan konsumen
 - Pendampingan penyelesaian sengketa konsumen
 - Pendampingan penyelesaian sengketa konsumen

6. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 - > Mendukung iklim usaha dan legalitas eksportir
 - Fasilitasi perizinan usaha dan ekspor
 - Kemudahan berusaha bagi eksportir
 - Sinkronisasi data pelaku usaha berorientasi ekspor
2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - > Penguatan basis eksportir UMKM
 - Pembinaan UMKM berorientasi ekspor
 - Kurasi produk UMKM potensial ekspor
 - Fasilitasi legalitas dan kesiapan usaha UMKM
3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi)
 - > Digitalisasi promosi dan informasi ekspor
 - Promosi produk unggulan daerah
 - Diseminasi informasi pasar ekspor
 - Dukungan platform digital promosi dan data ekspor
4. Bagian Perekonomian Setda
 - > Koordinasi kebijakan lintas sektor
 - Koordinasi kebijakan ekonomi daerah
 - Sinkronisasi pengembangan ekspor dengan kebijakan makro daerah
5. Bagian Kerjasama Setda
 - > Koordinasi kerjasama antar lembaga
 - Fasilitasi kerja sama antar lembaga

7. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

1. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)
 - > Infrastruktur dan tata ruang sebagai prasyarat industri
 - Dukungan pembangunan prasarana dasar industri
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 - > Perizinan dan investasi industri
 - Fasilitasi perizinan industri dan investasi
 - Peningkatan kemudahan berusaha sektor industri
3. Dinas Lingkungan Hidup
 - > Aspek keberlanjutan pembangunan industri
 - Persetujuan dan pengawasan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)
 - Pengendalian dampak lingkungan industri
 - Dukungan industri berkelanjutan dan ramah lingkungan
4. Dinas Ketenagakerjaan
 - > Industri dan ketenagakerjaan saling terkait
 - Penyediaan dan pembinaan tenaga kerja industri
 - Sinkronisasi kebutuhan tenaga kerja industri
 - Pengawasan norma ketenagakerjaan sektor industri

5. Dinas Perhubungan
 - > Kelancaran distribusi hasil industri
 - Pengaturan lalu lintas dan angkutan barang industri
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - > Penguatan struktur industri daerah
 - Pengembangan klaster industri kecil dan menengah
 - Peningkatan kapasitas IKM
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi)
 - > Data dan informasi sebagai dasar perencanaan
 - Penyediaan data industri daerah
 - Dukungan sistem informasi industri
 - Publikasi kebijakan dan potensi industri

8. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 - > Leading sector perizinan, mitra utama Disdagperin
 - Penerbitan dan pengelolaan izin usaha industri (OSS)
 - Integrasi data perizinan industri
 - Koordinasi teknis perizinan dan pengendalian
2. Satuan Polisi Pamong Praja
 - > Pengendalian izin memerlukan penegakan hukum
 - Penegakan Perda dan Perkada terkait izin usaha industri
 - Penertiban industri tanpa izin/tidak sesuai izin
 - Dukungan pengawasan lapangan
3. Dinas Lingkungan Hidup
 - > Izin industri terikat persyaratan lingkungan
 - Pengawasan kepatuhan persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
 - Rekomendasi dan tindak lanjut pelanggaran lingkungan industri
4. Dinas Ketenagakerjaan
 - > Kepatuhan izin berkorelasi dengan kepatuhan ketenagakerjaan
 - Pengawasan norma ketenagakerjaan industri
 - Sinkronisasi data perusahaan industri
 - Perlindungan tenaga kerja di sektor industri
5. Dinas Tata Ruang
 - > Kesesuaian izin dengan tata ruang
 - Pengawasan kesesuaian lokasi industri dengan tata ruang
 - Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang
 - Penertiban bangunan industri yang tidak sesuai RTRW
6. Bagian Hukum Setda
 - > Menjamin kepastian hukum
 - Pendampingan penyusunan regulasi daerah terkait perizinan industri
 - Bantuan hukum dalam penanganan pelanggaran izin
 - Harmonisasi kebijakan perizinan
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi)
 - > Digitalisasi dan transparansi pengendalian
 - Dukungan sistem informasi pengendalian izin
 - Publikasi kebijakan dan hasil pengawasan
 - Integrasi data lintas PD